

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Fenomena meningkatnya perpindahan paksa dan dinamika implementasi *Los Angeles Declaration on Migration and Protection* (LADMP) menunjukkan bahwa persoalan migrasi di kawasan Amerika tidak hanya berkaitan dengan kebijakan teknis, tetapi juga melibatkan tata kelola regional, ketimpangan kekuasaan, serta isu keamanan manusia yang saling berinteraksi. Kompleksitas tersebut menuntut adanya landasan teoritis yang kuat agar analisis penelitian tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan mampu menjelaskan hubungan sebab dan akibat, interaksi antaraktor, dan faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas diplomasi migrasi di kawasan. Pada bab ini akan memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jurnal berjudul “Temporary Protection: Towards a New Regional and Domestic Framework” karya Susan Martin, Andrew I. Schoenholtz, dan Deborah Waller Meyers (1998) membahas perkembangan kebijakan perlindungan sementara di Amerika Serikat terhadap individu yang melarikan diri dari kondisi krisis seperti konflik sipil, kekerasan, represi politik, maupun bencana alam, tetapi tidak selalu memenuhi definisi pengungsi dalam Konvensi 1951. Jurnal ini menekankan bahwa kebijakan perlindungan sementara yang selama ini diterapkan cenderung bersifat *ad hoc* dan belum mampu menjawab kompleksitas perpindahan paksa secara efektif, termasuk setelah diberlakukannya Temporary Protected Status (TPS) melalui Immigration Act of 1990. Martin dkk. menyoroti dua kelemahan utama dalam kebijakan perlindungan sementara, yaitu kegagalan sistem dalam melindungi kelompok yang rentan sejak awal krisis berkembang serta lemahnya mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan dan memastikan adanya “end game” yang jelas ketika kondisi negara asal membaik. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya pembangunan kerangka perlindungan yang lebih terstruktur melalui kerja sama regional, karena perpindahan massal tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu

negara tanpa pembagian tanggung jawab serta koordinasi antarnegara yang jelas. Dengan demikian, studi ini relevan sebagai landasan konseptual untuk memahami kebutuhan pendekatan regional dalam menangani krisis migrasi, sekaligus menjelaskan tantangan implementasi kebijakan perlindungan dalam konteks keterbatasan kapasitas, kepentingan politik, dan kebutuhan tata kelola migrasi yang lebih manusiawi (Martin et al., 1998).

Jurnal berjudul “El éxodo centroamericano” karya M^a Dolores Albiac Murillo (2019) membahas fenomena migrasi massal melalui caravana yang melibatkan sekitar tujuh ribu migran dari Amerika Tengah yang berjalan hingga mencapai perbatasan Amerika Serikat setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4.000 km, yang walaupun bersifat dramatis dan tidak terduga, tetap dianggap hanya sebagian kecil dari arus migrasi yang lebih besar dan terjadi secara rutin. Jurnal ini menyoroti bagaimana kemunculan karavan tersebut membuka realitas instabilitas kawasan Amerika Tengah serta menimbulkan tekanan politik terhadap Meksiko dan Amerika Serikat, terutama karena konteks transisi pemerintahan di Meksiko dan kepentingan elektoral domestik di Amerika Serikat. Albiac Murillo juga menjelaskan bahwa migrasi regional mengalami perkembangan dari yang awalnya bersifat internal menjadi eksternal dengan puncak-puncak yang dipengaruhi oleh faktor instabilitas, bencana, serta ketidakamanan, dan menekankan bahwa kasus ini tidak terlepas dari dinamika global yang lebih luas seperti hadirnya kerangka kerja sama internasional melalui *pactos mundiales* tentang migrasi dan pengungsi. Selain itu, jurnal ini memperlihatkan bagaimana respons kawasan terhadap migrasi masih berjalan lambat dan sering kali bergantung pada tekanan serta kepentingan negara besar, sehingga kerja sama regional kerap terfragmentasi dan tidak konsisten, termasuk dalam pembentukan rencana migrasi antara Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah dengan dukungan Amerika Serikat. Dengan demikian, studi ini relevan untuk memperkuat konteks penelitian tentang krisis migrasi di kawasan Amerika karena menunjukkan bahwa arus migrasi tidak hanya dipicu oleh faktor kemanusiaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik, kapasitas negara transit, dan kebutuhan koordinasi regional yang lebih terstruktur (Albiac Murillo, 2019).

Jurnal berjudul “No Country for Immigrant Children: From Obama’s ‘Humanitarian Crisis’ to Trump’s Criminalization of Central American Unaccompanied Minors” karya Chiara Galli (2018) membahas dinamika kebijakan imigrasi Amerika Serikat terhadap anak-anak migran tanpa pendamping (unaccompanied minors) dari kawasan Segitiga Utara Amerika Tengah, yaitu El Salvador, Guatemala, dan Honduras, yang pada 2014 menjadi sorotan publik ketika pemerintahan Obama menyatakan kondisi tersebut sebagai “krisis kemanusiaan.” Jurnal ini menekankan bahwa respons kebijakan pada era Obama memperlihatkan pendekatan yang kontradiktif karena di satu sisi memperkuat penegakan hukum melalui razia dan eksternalisasi kontrol perbatasan ke Meksiko, namun di sisi lain meningkatkan pendanaan untuk bantuan hukum bagi anak-anak migran serta mempertahankan sejumlah perlindungan kemanusiaan dalam sistem hukum imigrasi. Selanjutnya, Galli menjelaskan bahwa perubahan pemerintahan pada era Trump menghasilkan pergeseran pendekatan yang lebih keras dan cenderung mengkriminalisasi migran Amerika Tengah, termasuk melalui narasi “loopholes” dan pengaitan migran dengan ancaman kriminal, yang berdampak pada melemahnya akses perlindungan dan meningkatnya ketidakpastian bagi anak-anak migran dan keluarga mereka. Studi ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak migran di Amerika Serikat bersifat rentan terhadap perubahan politik domestik, sehingga keberlangsungan kebijakan kemanusiaan sangat dipengaruhi oleh agenda keamanan nasional dan tekanan politik internal. Dengan demikian, jurnal ini relevan untuk penelitian mengenai krisis migrasi di kawasan Amerika karena memperlihatkan bagaimana faktor politik domestik dan framing keamanan mempengaruhi kebijakan migrasi, serta memperkuat argumen bahwa tata kelola migrasi regional membutuhkan mekanisme perlindungan yang lebih konsisten dan terkoordinasi (Galli, 2018).

Jurnal berjudul “Regionalismos e Migrações Internacionais na América do Sul: Contexto e Perspectivas Futuras sobre as Experiências na Comunidade Andina, no Mercosul e na Unasul” karya María del Carmen Villarreal Villamar (2018) membahas hubungan antara proses regionalisme dan kebijakan migrasi internasional di Amerika Selatan melalui analisis tiga organisasi regional, yaitu

Comunidad Andina (CAN), Mercosul, dan Unasul. Jurnal ini menekankan bahwa migrasi internasional semakin menjadi isu yang dipolitisasi dalam konteks globalisasi dan menuntut negara-negara untuk tidak hanya mempertahankan kedaulatan serta membatasi arus migrasi, tetapi juga mengembangkan bentuk kerja sama dan tata kelola migrasi bersama di tingkat regional. Villarreal Villamar menunjukkan bahwa dalam perkembangan regionalisme “baru” dan regionalisme pasca-liberal/pasca-hegemonik, negara-negara di kawasan mulai memasukkan isu migrasi dalam agenda integrasi yang tidak lagi semata ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial, politik, dan hak asasi manusia, yang didorong oleh faktor seperti “*left turn*” di kawasan, munculnya narasi pro-hak migran, serta meningkatnya partisipasi aktor non-negara. Studi ini juga menyoroti bahwa CAN, Mercosul, dan Unasul menghasilkan berbagai regulasi regional seperti kebijakan mobilitas, fasilitasi dokumen perjalanan, perlindungan sosial-laboral migran, hingga gagasan mengenai cidadania regional, namun tetap menghadapi kendala dalam efektivitas implementasi, rendahnya pengetahuan publik terhadap norma yang ada, serta masih kuatnya pendekatan keamanan yang mendorong kriminalisasi migrasi. Dengan demikian, jurnal ini relevan bagi penelitian migrasi regional karena memperlihatkan bahwa kerangka kerja sama migrasi di tingkat kawasan dapat berkembang menjadi pendekatan berbasis hak, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada dinamika politik regional, konsistensi komitmen negara anggota, serta kapasitas institusional untuk menerjemahkan norma regional ke praktik kebijakan yang nyata (Villarreal Villamar, 2018).

Jurnal berjudul “Building Capacity for the Transnational Regulation of Migration” karya Cristina M. Rodríguez (2010) membahas bagaimana perdebatan publik dan kebijakan migrasi, khususnya di Amerika Serikat, sering kali dipengaruhi oleh dua kesalahan konseptual utama, yaitu anggapan bahwa persoalan migrasi dapat diselesaikan melalui pengetatan mekanisme penegakan hukum domestik semata, serta pandangan bahwa migrasi merupakan masalah yang dapat “diselesaikan” secara tuntas, padahal migrasi merupakan fenomena lintas batas yang bersifat berkelanjutan dan terbentuk oleh faktor struktural serta historis. Rodríguez menekankan bahwa migrasi pada dasarnya merupakan fenomena

internasional sehingga pengaturannya menuntut keterlibatan pemerintah lain dan penguatan kerja sama transnasional, bukan pendekatan unilateral yang berpusat pada strategi “gatekeeping.” Dalam analisisnya, Rodríguez menunjukkan bahwa regulasi migrasi membutuhkan pembangunan kapasitas kelembagaan lintas negara melalui mekanisme bilateral dan transnasional seperti jaringan diplomatik dan pertukaran informasi antar instansi, kerja sama administratif lintas perbatasan, serta jaringan masyarakat sipil yang berperan dalam penyediaan layanan sosial dan perlindungan kepentingan migran. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya prinsip *burden-sharing* sebagai dasar penguatan kerja sama, agar negara-negara yang terlibat dalam relasi migrasi tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga menanggung biaya secara proporsional, sehingga tata kelola migrasi dapat bergerak ke arah manajemen lintas batas yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, studi ini relevan untuk penelitian mengenai diplomasi migrasi regional karena memperkuat argumen bahwa efektivitas kerja sama migrasi sangat bergantung pada kapasitas koordinasi institusional, pembagian tanggung jawab yang adil, serta konstruksi kerja sama antarnegara yang mampu melampaui kepentingan domestik semata (Rodríguez, 2010).

Jurnal berjudul “La Conferencia Sudamericana de Migraciones y el Proceso Puebla: ¿entre la seguridad y los derechos?” karya Jacques Ramírez G., Ireri Ceja C., dan Yolanda Alfaro (2019) membahas peran dua forum regional utama di benua Amerika dalam membentuk kerangka kebijakan migrasi regional, yaitu Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM) dan Conferencia Regional de Migraciones (CRM) atau Proceso Puebla, sebagai ruang multilateral yang mendorong pendekatan *governabilidad migratoria* atau tata kelola migrasi. Jurnal ini menegaskan bahwa meskipun kedua proses tersebut bersifat tidak mengikat, keduanya berperan penting dalam membangun konsensus, mempengaruhi narasi kebijakan, serta mendorong adopsi agenda migrasi di tingkat nasional, namun tetap berada dalam paradigma yang sama yaitu *migration management* yang merefleksikan asimetris kekuasaan dan hubungan dominasi antarnegara. Penulis menunjukkan bahwa orientasi kebijakan dalam kedua forum cenderung dipengaruhi oleh karakter arus migrasi di kawasan apakah negara merupakan asal,

transit, atau tujuan yang pada akhirnya membentuk agenda dan kecenderungan politik yang berbeda, di mana Proceso Puebla lebih condong pada pendekatan keamanan dan kontrol migrasi tidak reguler yang banyak didorong negara tujuan seperti Amerika Serikat dan Kanada, sedangkan CSM relatif lebih menekankan dimensi hak asasi manusia dan perlindungan migran. Melalui analisis komparatif dokumen dan deklarasi kedua forum dari rentang waktu yang panjang, jurnal ini juga menunjukkan bahwa konsep “migrasi aman, tertib, dan teratur” sering digunakan sebagai legitimasi, namun pada praktiknya kebijakan yang lahir dapat mengarah pada “kontrol dengan wajah humanis” serta tetap mengutamakan kepentingan negara dibanding kebutuhan migran, sehingga memperlihatkan adanya ketegangan antara narasi perlindungan dan agenda keamanan dalam tata kelola migrasi regional. Dengan demikian, studi ini relevan sebagai pijakan teoretis dan empiris untuk menelaah diplomasi migrasi regional karena memperjelas bagaimana mekanisme kerja sama yang tidak mengikat dapat tetap membentuk kebijakan, sekaligus menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan serta orientasi keamanan negara tujuan dapat menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) secara adil dan efektif (Ramírez G. et al., 2019).

Berdasarkan enam jurnal yang ditinjau, dapat disimpulkan bahwa literatur mengenai migrasi di kawasan Amerika telah berkembang dalam beberapa fokus besar, namun masih menyisakan kesenjangan penting yang belum terjawab secara komprehensif. Studi Martin, Schoenholtz, dan Meyers (1998) menekankan bahwa kebijakan perlindungan sementara cenderung bersifat *ad hoc* dan membutuhkan kerangka regional yang lebih terstruktur, tetapi pembahasannya lebih berorientasi pada konteks domestik Amerika Serikat dan belum menjelaskan bagaimana diplomasi regional kontemporer dapat membentuk tata kelola migrasi yang lebih stabil. Sementara itu, Albiac Murillo (2019) menggambarkan fenomena eksodus dan karavan migran Amerika Tengah sebagai peristiwa migrasi massal yang dipengaruhi instabilitas kawasan serta tarik-menarik kepentingan politik negara transit dan tujuan, namun kajian tersebut lebih kuat dalam menjelaskan konteks fenomena dan belum menelaah mekanisme diplomasi regional sebagai instrumen

kebijakan kolektif untuk mengatasi krisis secara berkelanjutan. Di sisi lain, Galli (2018) menunjukkan bahwa kebijakan migrasi Amerika Serikat terhadap anak migran sangat dipengaruhi dinamika politik domestik dan framing keamanan, namun fokus penelitian lebih menekankan perubahan rezim kebijakan domestik, bukan pada bagaimana kebijakan regional seperti deklarasi multilateral memengaruhi pola perlindungan dan koordinasi lintas negara.

Literatur yang membahas migrasi melalui perspektif regionalisme dan tata kelola kawasan juga telah memberikan kontribusi signifikan, namun masih menyisakan gap pada konteks LADMP. Villarreal Villamar (2018) memperlihatkan bahwa institusi regional di Amerika Selatan mampu menghasilkan norma mobilitas dan perlindungan migran, tetapi menghadapi hambatan implementasi serta politisasi isu migrasi, sedangkan Ramírez G., Ceja C., dan Alfaro (2019) menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi keamanan dan pendekatan berbasis hak dalam forum-forum migrasi regional yang bersifat tidak mengikat. Namun, kedua kajian ini berfokus pada arsitektur regionalisme dan forum migrasi di Amerika Selatan/Latin, bukan pada LADMP sebagai bentuk diplomasi regional baru yang dipimpin Amerika Serikat dalam konteks krisis migrasi kontemporer. Selanjutnya, Rodríguez (2010) menguatkan argumen bahwa migrasi membutuhkan regulasi transnasional melalui pembangunan kapasitas dan pembagian tanggung jawab (*burden-sharing*), tetapi analisisnya bersifat konseptual dan belum mengevaluasi bagaimana deklarasi regional tertentu diterjemahkan ke dalam praktik implementasi, terutama terkait ketimpangan kapasitas antarnegara serta efektivitas koordinasi pendanaan.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian utama terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik dan mendalam menghubungkan fenomena krisis migrasi kawasan Amerika dengan evaluasi efektivitas diplomasi regional melalui LADMP sebagai kerangka tata kelola migrasi baru. Literatur yang ada cenderung terpisah antara fokus pada kebijakan domestik negara tujuan (AS), pembacaan fenomena migrasi massal, atau studi regionalisme dan forum migrasi yang berbeda, sehingga belum cukup menjelaskan bagaimana LADMP bekerja sebagai instrumen *soft law* yang mengusung prinsip *shared responsibility*, tetapi menghadapi

hambatan implementasi seperti ketimpangan pembagian beban, perbedaan kapasitas institusional negara asal-transit-tujuan, dan pengaruh politik domestik negara dominan.

Jurnal berjudul “Digital Rights and the State of Exception: Internet Shutdowns from the Perspective of Just Securitization Theory” karya Johannes Thumfart (2024) membahas fenomena global pemutusan akses internet (*internet shutdowns*) sebagai instrumen kebijakan keamanan negara, dengan menggunakan kerangka normatif Just Securitization Theory (JST). Melalui studi kasus di berbagai negara mulai dari rezim otoriter hingga demokrasi mapan seperti India, Amerika Serikat, dan Inggris artikel ini menyoroti ketegangan mendasar antara justifikasi keamanan negara dan perlindungan hak-hak fundamental, khususnya kebebasan berekspresi, berkumpul, serta hak atas konektivitas digital. Thumfart berargumen bahwa sebagian besar praktik *internet shutdowns* tidak memenuhi kriteria legitimasi sebagai tindakan keamanan luar biasa karena bersifat tidak proporsional, berdampak luas pada warga sipil, dan sering kali digunakan untuk tujuan politik seperti pembungkaman oposisi atau penghindaran akuntabilitas negara. Dengan mengembangkan kriteria ketat berdasarkan JST seperti objektivitas ancaman, proporsionalitas, minimisasi dampak, ekspektasi keberhasilan, dan kewajiban desekuritisasi artikel ini menegaskan bahwa pemutusan internet hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang sangat terbatas dan spesifik. Kontribusi utama jurnal ini terletak pada kemampuannya menjembatani teori sekuritisasi dengan analisis normatif kebijakan keamanan kontemporer, sekaligus memperkuat argumen mengenai pentingnya konektivitas digital sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak asasi manusia di era modern. Dengan demikian, studi ini relevan tidak hanya bagi kajian keamanan kritis, tetapi juga bagi diskursus yang lebih luas mengenai batas-batas legitimasi negara dalam menerapkan kebijakan darurat di tengah tantangan keamanan non-tradisional.

Jurnal berjudul “Regional Migration Governance in Africa and Beyond: A Framework of Analysis” karya Eva Dick dan Benjamin Schraven (2018) membahas bagaimana tata kelola migrasi regional berkembang sebagai respons atas meningkatnya mobilitas lintas negara yang tidak dapat ditangani secara efektif

hanya melalui kebijakan nasional maupun kerangka global. Jurnal ini menekankan bahwa sebagian besar migrasi internasional, khususnya di kawasan Global South, bersifat intra-regional dan melibatkan negara asal, transit, serta tujuan yang saling terhubung, sehingga membutuhkan mekanisme pengelolaan berbasis kawasan. Dick dan Schraven mengkritik kecenderungan literatur migrasi yang terlalu berfokus pada level global seperti rezim pengungsi internasional atau pada kebijakan domestik negara, sementara peran organisasi regional sering kali terabaikan. Melalui pengembangan kerangka analisis tata kelola migrasi regional, penulis menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama migrasi sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan organisasi regional, distribusi kepentingan dan kekuasaan antarnegara anggota, serta tekanan aktor eksternal seperti negara donor dan organisasi internasional. Dengan menggunakan studi kasus organisasi regional di Afrika, seperti ECOWAS dan IGAD, jurnal ini menyoroti bahwa meskipun pendekatan regional menawarkan fleksibilitas dan kedekatan kontekstual, implementasinya kerap menghadapi kendala berupa ketimpangan kapasitas institusional, lemahnya komitmen politik, dan dominasi negara-negara tertentu dalam penentuan agenda migrasi. Oleh karena itu, studi ini relevan sebagai landasan konseptual untuk memahami tata kelola migrasi regional sebagai proses politik yang tidak netral, melainkan sarat dengan relasi kekuasaan dan kepentingan, sekaligus menjelaskan mengapa pendekatan regional sering dipromosikan sebagai solusi atas krisis migrasi tetapi menghadapi tantangan serius dalam praktik implementasinya (Dick & Schraven, 2018).

Jurnal berjudul “Populism, Hindu Nationalism, and Foreign Policy in India: The Politics of Representing ‘the People’” karya Thorsten Wojczewski (2020) membahas bagaimana populisme dan nasionalisme Hindu membentuk arah serta praktik kebijakan luar negeri India dengan menempatkan kebijakan luar negeri sebagai arena politik representasi domestik. Jurnal ini berangkat dari kritik terhadap literatur Hubungan Internasional yang cenderung memisahkan populisme sebagai fenomena domestik dari analisis kebijakan luar negeri, padahal dalam praktiknya kebijakan luar negeri justru kerap digunakan oleh aktor populis untuk membangun legitimasi politik di dalam negeri. Melalui pendekatan poststrukturalis dan analisis

wacana yang merujuk pada teori populisme Ernesto Laclau, Wojczewski menunjukkan bahwa pemerintahan Narendra Modi memanfaatkan kebijakan luar negeri untuk membingkai identitas “the people” India sebagai entitas homogen yang berhadapan dengan elite liberal dan aktor eksternal yang dikonstruksikan sebagai ancaman. Jurnal ini menekankan bahwa nasionalisme Hindu tidak hanya berfungsi sebagai ideologi domestik, tetapi juga diterjemahkan ke dalam narasi kebijakan luar negeri yang menegaskan kedaulatan, kebanggaan nasional, dan posisi India sebagai kekuatan yang mandiri di panggung internasional. Dengan menganalisis pidato, simbolisme diplomatik, dan praktik kebijakan luar negeri India, studi ini menunjukkan bahwa populisme membentuk kebijakan luar negeri tidak hanya melalui perubahan kebijakan substantif, tetapi juga melalui produksi makna, identitas, dan klaim representasi politik. Dengan demikian, jurnal ini relevan sebagai landasan konseptual untuk memahami kebijakan luar negeri sebagai instrumen politik populis, sekaligus memperluas kajian Hubungan Internasional dengan menyoroti bagaimana relasi antara wacana, identitas, dan kekuasaan domestik memengaruhi perilaku negara di tingkat internasional (Wojczewski, 2020).

Jurnal berjudul “The Securitisation of Cyberspace Governance in Singapore” karya Syed Mohammed Ad’ha Aljunied (2019) menganalisis bagaimana ruang siber di Singapura dikonstruksikan sebagai isu keamanan melalui proses sekuritisasi oleh negara. Dengan menggunakan teori sekuritisasi Mazhab Kopenhagen dan *critical discourse analysis*, jurnal ini menunjukkan bahwa ancaman siber dibingkai sebagai ancaman eksistensial terhadap stabilitas nasional, ekonomi, dan kohesi sosial, sehingga melegitimasi penggunaan kebijakan luar biasa di luar prosedur politik normal. Aljunied menekankan peran elite negara berlatar belakang militer dalam membentuk wacana keamanan siber yang bercorak militeristik, baik dalam perlindungan infrastruktur kritis maupun pengaturan konten digital masyarakat. Studi ini juga menyoroti bahwa meskipun sekuritisasi tersebut memperoleh legitimasi publik yang luas, ia memunculkan ketegangan dengan isu kebebasan sipil dan kontrol negara. Dengan demikian, jurnal ini relevan sebagai rujukan konseptual untuk memahami bagaimana teori sekuritisasi diterapkan pada

isu keamanan non-tradisional serta bagaimana relasi kekuasaan dan wacana membentuk praktik tata kelola di era digital (Aljunied, 2019).

Keempat jurnal yang direview memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana isu non-tradisional dikelola melalui wacana keamanan, kebijakan negara, dan mekanisme tata kelola lintas batas. Thumfart (2024) dan Aljunied (2019) secara mendalam membahas proses sekuritisasi pada isu digital dengan menyoroti legitimasi kebijakan luar biasa serta implikasinya terhadap hak-hak sipil. Namun, kedua studi tersebut masih berfokus pada konteks kebijakan domestik dan belum mengkaji bagaimana logika sekuritisasi berinteraksi dengan mekanisme kerja sama regional atau tata kelola lintas negara dalam menangani isu transnasional yang melibatkan banyak aktor. Sementara itu, Dick dan Schraven (2018) menawarkan kerangka analisis tata kelola migrasi regional yang komprehensif, tetapi lebih menekankan desain kelembagaan dan dinamika organisasi regional, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan proses sekuritisasi atau pembingkai keamanan yang dilakukan oleh negara-negara kunci dalam kawasan.

Di sisi lain, Wojczewski (2020) menunjukkan bagaimana populisme dan nasionalisme membentuk kebijakan luar negeri melalui wacana representasi “the people”, namun analisisnya masih terbatas pada dimensi identitas dan politik domestik serta belum dikaitkan dengan praktik tata kelola regional terhadap isu transnasional seperti migrasi. Dengan demikian, literatur yang ada masih cenderung memisahkan analisis sekuritisasi, kebijakan luar negeri, dan tata kelola migrasi regional sebagai ranah kajian yang terpisah. Kesenjangan penelitian muncul dari belum adanya kajian yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut untuk menjelaskan bagaimana wacana keamanan, kepentingan politik negara dominan, dan ketimpangan kapasitas antarnegara secara simultan membentuk efektivitas kerja sama dan tata kelola migrasi di tingkat kawasan.

Literatur terdahulu telah menunjukkan bahwa migrasi internasional, khususnya di kawasan Amerika dan Global South, merupakan fenomena struktural yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui kebijakan nasional yang bersifat ad hoc atau unilateral. Sejumlah studi menekankan perlunya pendekatan regional

dan kerja sama lintas negara berbasis pembagian tanggung jawab untuk menangani perpindahan paksa, perlindungan migran, serta kapasitas negara asal dan transit (Martin et al., 1998; Rodríguez, 2010). Penelitian lain memperkaya konteks empiris dengan menunjukkan bagaimana arus migrasi di kawasan Amerika Tengah dan Selatan dipengaruhi oleh instabilitas struktural, kepentingan politik domestik negara tujuan, serta ketimpangan kapasitas institusional, sehingga kerja sama migrasi regional kerap bersifat terfragmentasi dan tidak konsisten dalam implementasinya (Albiac Murillo, 2019; Galli, 2018; Villarreal Villamar, 2018; Ramírez G. et al., 2019).

Namun demikian, literatur tersebut masih cenderung memisahkan analisis tata kelola migrasi regional dari dinamika wacana keamanan dan kebijakan luar negeri aktor dominan. Studi-studi tentang sekuritisasi isu non-tradisional menunjukkan bagaimana framing ancaman digunakan untuk melegitimasi kebijakan luar biasa negara dan sering kali menimbulkan ketegangan dengan perlindungan hak asasi manusia, tetapi umumnya berfokus pada konteks domestik dan belum mengaitkannya dengan kerja sama regional (Aljunied, 2019; Thumfart, 2024). Sementara itu, kajian populisme dan kebijakan luar negeri menyoroti peran wacana dan representasi politik domestik dalam membentuk perilaku negara, namun belum banyak menjelaskan implikasinya terhadap tata kelola migrasi multilateral (Wojczewski, 2020). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara integratif menghubungkan proses sekuritisasi migrasi, kepentingan kebijakan luar negeri negara dominan, dan praktik tata kelola migrasi regional dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kesenjangan inilah yang membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengkaji diplomasi regional Amerika Serikat melalui Los Angeles Declaration on Migration and Protection (LADMP) sebagai arena pertemuan antara wacana keamanan, relasi kekuasaan antarnegara, dan efektivitas kerja sama migrasi di kawasan Amerika.